BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang memiliki perekonomian yang sangat baik saat ini. Perekonomian yang sangat baik dari Jepang ini tidak didapatkan dengan mudah, melainkan melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Di balik kesuksesannya sebagai negara maju saat ini, Jepang juga pernah mengalami yang namanya keterpurukan ekonomi pasca Perang Dunia II. Hal ini bermula ketika Jepang mulai terlibat dalam Perang Dunia II yang diawali dengan penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941 dan berhasil memporak-porandakan Angkatan Laut Amerika (Ojong, 2008). Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II bukanlah sesuatu yang datangnya tiba-tiba, namun merupakan puncak dari suatu proses berkembangnya negara-negara fasis seperti Italia, Jerman, dan Jepang membuat situasi politik di kawasan Eropa dan Asia semakin memanas dengan diwarnai ketegangan yang mendorong terjadinya Perang Dunia II. Jerman dan Italia bergerak di Eropa dan Afrika melawan Perancis, Inggris, Rusia, sedangkan Jepang di wilayah Asia terutama Asia Timur, Asia Tenggara, dan Indocina. Jepang dengan ambisinya ingin menjadikan dirinya sebagai negara yang paling hebat di Asia.

Dalam Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan setelah pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet juga melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) yang melanggar Pakta Netralitas Soviet-Jepang. Kaisar Hirohito ikut 'campur tangan' setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut, dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan Sekutu dalam Deklarasi Postdam untuk mengakhiri perang. Setelah berlangsung perundingan di 'balik layar' selama beberapa hari, dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato melalui radio di hadapan rakyat pada tanggal 15

Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut *Gyokuon-Housou* (Siaran Suara Kaisar), Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu (Wikipedia, diakses 8 Juli 2017).

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II memunculkan banyak masalah dalam bidang sosial dan ekonomi di dalam negeri Jepang. Selama masa perang, kota-kota yang penting bagi Jepang seperti Tokyo, Osaka, Nagoya, Kobe, dan Yokohama diserang oleh pasukan Sekutu melalui serangan udara. Penyerangan pasukan Sekutu tersebut bukan hanya menghancurkan fasilitas penting untuk transportasi di Jepang seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, tetapi juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur seperti pemukiman penduduk, gedung-gedung dan pabrik. Selain itu, di bidang ekonomi karena pabrik-pabrik juga hancur, maka kegiatan produksi menjadi terhenti. Hal itu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga menambah jumlah pengangguran. Kehancuran tersebut juga memunculkan masalah sosial karena banyak orang yang kehilangan tempat tinggalnya.

Jepang juga mengalami kekurangan persediaan makanan bagi rakyatnya karena terjadi gagal panen dan produksi pangan mengalami penurunan setelah perang berakhir. Hubungan perdagangan dengan negara asing dan daerah koloni Jepang juga menjadi terputus. Selain itu, Jepang sebagai negara yang kalah harus membayar ganti rugi perang dan kehilangan daerah koloninya di luar negeri seperti Manchuria, Korea, dan lain-lain.

Pada tanggal 30 Agustus 1945, sekutu kembali mendatangi Jepang bersama sosok Jenderal yang bernama Douglas MacArthur. Jenderal tersebut ditunjuk oleh Presiden Harry S. Truman sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu. Kemudian pada tanggal 2 September 1945, Jenderal MacArthur menerima penyerahan resmi Jepang melalui penandatanganan suatu dokumen penyerahan. Kemudian pada tanggal 6 September 1945, dibentuklah Panglima Tertinggi Sekutu (*Supreme Commander of the Allied Powers/SCAP*) yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat. Tugas utama dari SCAP adalah memberikan instruksi kepada pemerintah Jepang untuk melaksanakan kebijakan yang

disampaikan oleh sekutu. Dengan kata lain, SCAP merupakan kekuasaan tertinggi pemerintah pendudukan sekutu di Jepang.

Pada masa awal pendudukan Sekutu, kebijakan yang disampaikan oleh SCAP (*Supreme Commander of the Allied Power*) masih berdasarkan tujuan utama dari Deklarasi Postdam yaitu berkonsentrasi pada demiliterisasi dan demokratisasi Jepang. Jadi kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP pada awal masa pendudukan adalah bertujuan untuk mendukung demiliterisasi dan demokratisasi. Pada saat itu, bidang ekonomi belum menjadi prioritas dalam kebijakan yang diambil SCAP, tetapi dengan kondisi perekonomian Jepang yang hancur dan banyak masalah yang terjadi setelah perang, menyebabkan pelaksanaan tujuan utama dari Deklarasi Postdam bagi Jepang menjadi terhambat (Okita, 1992).

Pada Januari 1948, tujuan politik Amerika Serikat berubah dari yang awalnya hanya berfokus pada demiliterisasi dan demokratisasi berubah menjadi kebijakan untuk mengadakan pembangunan ekonomi dan menciptakan Jepang yang kuat. Untuk menanamkan kebijakan ini, lalu dilaksanakan suatu program stabilisasi ekonomi yang mengharuskan pendapatan dan pengeluaran seimbang, pembatasan kredit, perluasan produksi dan perdagangan. Inflasi yang merajalela dapat diatasi pada tahun 1949, dan Jepang mulai menuju kebangkitannya.

Pada pertengahan tahun 1949, keadaan pangan telah mengalami perbaikan dan produksi mulai kembali pulih. Seiring dengan berubahnya situasi Internasional, Amerika Serikat mulai memberikan prioritas bagi pembangunan kembali Jepang. Produksi dirangsang dengan menerapkan sistem “prioritas produksi”. Contoh dari sistem produksi adalah produksi baja untuk meningkatkan produksi batubara, dan produksi batubara untuk meningkatkan produksi baja (Universitas Sumatera Utara, diakses 5 November 2017).

“Seorang penasihat keuangan Markas Besar Tentara Sekutu bernama Joseph Dodge yang merupakan ahli ekonomi klasik dalam bidang kebijakan fiskal dan moneter, yang menolak campur tangan pemerintah, pada tahun 1949 mulai melaksanakan apa yang kemudian dikenal dengan *Dodge Line*, yaitu program untuk mengendalikan inflasi serta meletakkan landasan bagi perkembangan ekonomi Jepang dengan kekuatan sendiri. Dodge mengambil sikap bahwa sesuai kebijakan itu Jepang tidak boleh mencari bantuan dari

Amerika Serikat, tetapi harus mencapai pemulihan melalui usahanya sendiri di antara saingan bebas” (Ravianto, 1986, p.91).

Dengan diberlakukannya program Dodge yang terpusat pada kebijakan neraca pembayaran yang seimbang serta menetapkan nilai tukar Yen terhadap Dollar yang tetap, dan dalam bulan April 1949 dengan menetapkan adanya satu kurs tunggal, 360 Yen untuk setiap 1 Dollar Amerika Serikat untuk memungkinkan ekspor. Dengan kurs ini Jepang harus dapat memulihkan daya saing Internasional.

Setahun berlalu setelah diberlakukannya kebijakan ekonomi Jepang (*Dodge Plan*), terjadi Perang Korea, yaitu konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. “Pecahnya” perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan pada tahun 1950-1953 ini memberikan kesempatan bagi Jepang untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara ini. Ketika itu, Amerika Serikat yang terlibat langsung dalam Perang Korea, memanfaatkan Jepang sebagai pangkalan logistik pasukan militernya di Kawasan pasifik. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah pendudukan sekutu harus merubah kebijakan yang semula melarang industri yang berkaitan dengan militer, akhirnya berubah menjadi penghidupan kembali industri yang berkaitan dengan militer. Dengan adanya perubahan tersebut, berdampak kepada perekonomian Jepang yang mendapat keuntungan dalam meningkatkan produksi industri yang berkaitan dengan militer karena Amerika Serikat melakukan pembelian-pembelian pada industri tersebut. Tujuan perubahan kebijakan itu diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung kekuatan militernya di Asia dalam menghadapi Perang Korea.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Dampak Perang Korea (1950-1953) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor yang mendorong Jepang untuk menguasai Asia karena keinginan Jepang menjadikan dirinya sebagai negara yang paling hebat di Asia
2. Penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II karena dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, serta melemahnya kekuatan militer
3. Dampak Deklarasi Postdam terhadap Jepang menyebabkan menyerahnya Jepang kepada sekutu
4. Kebijakan SCAP terhadap perekonomian Jepang berupa pembangunan kembali perekonomian Jepang yang terpuruk
5. Perang Korea berdampak signifikan terhadap perekonomian Jepang

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dampak Perang Korea terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan SCAP terhadap perekonomian Jepang pasca Perang Dunia II ?
2. Bagaimana dampak Perang Korea (1950-1953) terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kebijakan SCAP terhadap perekonomian Jepang pasca Perang Dunia II
2. Dampak Perang Korea (1950-1953) terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang sejarah yakni mengenai kebijakan SCAP terhadap perekonomian Jepang dan dampak Perang Korea terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara penguraian dan penggambaran hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Penulisan ini menganalisis data dengan menggunakan bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan. Sumber-sumber data sebagai referensi dari penulisan ini adalah buku, jurnal, dan sumber-sumber data dari internet.

H. Landasan Teori

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (Working Paper Unila, diakses 8 Juli 2017).

Dampak dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan,

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Perang Korea

Perang Korea adalah konflik militer antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Dalam perang tersebut Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan PBB, sementara Korea Utara didukung oleh Republik Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet. Perang ini adalah hasil dari pembagian fisik Korea dengan persetujuan dari Sekutu yang menang pada akhir Perang Pasifik pada akhir Perang Dunia II. Semenanjung Korea diperintah oleh Jepang dari tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, administrator Amerika membagi semenanjung sepanjang garis lintang 38 derajat, dengan pasukan Amerika Serikat menduduki bagian selatan dan pasukan Soviet menduduki bagian utara (Saylor Academy, diakses 5 Juli 2018).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Working Paper USU, diakses 17 April 2018).

Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan

data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

4. Negara Jepang

Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia. Di Jepang terdapat 4 pulau besar serta ribuan pulau kecil. Bentuk geografis Jepang memanjang dari utara ke selatan kira-kira 3800 kilometer. Luasnya kira-kira 370.000 kilometer persegi. Pulau-pulau besar itu antara lain : Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kepulauan Jepang 75% wilayahnya terdiri dari pegunungan, dan 25% terdiri dari daratan. Pegunungan Jepang memanjang diseluruh kepulauannya, berupa bukit-bukit yang tertutup hutan dan diantaranya ada lembah-lembah sempit yang dapat digunakan untuk pertanian. Di sana-sini terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi ke atas dan beberapa diantaranya adalah gunung berapi. Jepang terletak di ujung barat Samudra Pasifik; di sebelah timur laut Jepang; dan bertetangga dengan Cina, Korea, dan Rusia. Kepulauan Jepang terletak di belahan Bumi bagian utara, membujur dari selatan di kepulauan Okinawa yang berbatasan dengan Taiwan; di sebelah barat adalah laut Cina; dan Samudra Pasifik di sebelah timurnya (Working Paper UPI, diakses 8 Juli 2017).

5. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah,

perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*).² Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi (Rusdiani, 2017).

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam empat bab secara sistematis sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini berisi tentang kebijakan SCAP terhadap perekonomian Jepang.

BAB III, bab ini berisi tentang dampak Perang Korea (1950-1953) terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II.

BAB IV, merupakan kesimpulan.